

## RINGKASAN

NUR ROHMA ALIF DLUHAH. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan UMKM PT ABC Tahun 2018 oleh KKP Wilsary (*Annual Income Tax Compliance for MSME Corporate Tax PT ABC in 2018 by KKP Wilsary*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkesinambungan. Pajak terbagi dalam beberapa sektor, salah satunya Pajak Penghasilan yang memiliki potensi penerimaan cukup besar mengingat banyaknya sektor bisnis yang sedang berkembang di Indonesia, seperti sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jumlah mencapai 98,7% atau lebih dari 59 juta unit pada tahun 2019. Pemerintah melakukan upaya peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak khususnya dari sektor UMKM dengan menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk merubah kebijakan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, perubahan ini diharapkan dapat meringankan dan memberikan keadilan bagi setiap Wajib Pajak UMKM.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan profil umum PT ABC dan rencana kerja KKP Wilsary, menguraikan proses perhitungan Pajak Penghasilan UMKM PT ABC, menguraikan proses penyetoran Pajak Penghasilan UMKM PT ABC dan menguraikan proses pelaporan SPT Tahunan PT ABC.

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Wilsary selama dua bulan mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai 24 Maret 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

PT ABC merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang jasa *Ground Handling* dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun, tetapi PT ABC memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, hal ini sesuai dengan kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018. PT ABC menunjuk KKP Wilsary untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan. KKP Wilsary menyusun rencana kerja dalam memenuhi kontrak perjanjian dengan klien. Proses perhitungan Pajak Penghasilan UMKM PT ABC meliputi pengumpulan dokumen, membuat rekapitulasi faktur pajak keluaran, menginput mutasi rekening koran bank dan rekapitulasi faktur pajak keluaran ke aplikasi *Accurate*, serta membuat rekapitulasi peredaran bruto dan perhitungan PPh Final PT ABC. PT ABC belum menyetor PPh terutang selama tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020, sehingga memungkinkan PT ABC akan mendapat Surat Tagihan Pajak dan dikenai sanksi bunga sebesar 2% atas keterlambatan penyetoran PPh yang seharusnya dibayar setiap bulan. Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PT ABC dilakukan melalui website DJP *Online* dengan melaporkan *file* CSV dan lampiran-lampirannya dalam bentuk *file* PDF yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT 1771* Badan.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan, UMKM